KONFLIK ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) DI PERAIRAN NATUNA ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Isalm Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Pernyataan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:

PUTRI FEBRI ARISTA

NIM. I71217040

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Febri Arista

Nim : I71217040

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Konflik Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) di Perairan Natuna Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak diajukan ke Lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar skolastik.
2) Skripsi ini benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta atas karya orang lain.
3) Jika nanti skripsi ini dibuktikan atau dapat dibuktikan karena pelanggaran hak cipta, saya bersedia menanggung setiap hasil yang terjadi.

Surabaya, 1 Juli 2021

Yang menyatakan

Putri Febri Arista

NIM: I71217040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap pengesahan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Febri Arista

NIM : I71217040

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Konflik Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok**, saya berpendapat bahwa proposal skripsi tersebut dapat diajukan untuk diseminarkan.

Surabaya, 1 Juli 2021

Pembimbing

Zaky Ismail, M.S.I.,

NIP.198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Putri Febri Arista dengan judul: "**Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal Pada Tanggal 23 Juli 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Zaky Ismail, M.Si	**Laili Bariroh, M.Si**
NIP.198212302011011007	NIP.197711032009122002
Penguji III	Penguji IV
M. Anas Fakhruddin, S. Th.I, M. Si	**Muchammad Ismail, MA**
NIP.198202102009011007	NIP.198005032009121003

Surabaya, 23 Juli 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzzaki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phill, Ph.D

NIP.197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUTRI FEBRI ARISTA
NIM : I71217040
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/ILMU POLITIK
E-mail address : celinegendis22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :
KONFLIK ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) DI PERAIRAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2021

Penulis

Putri Febri Arista

ABSTRAK

Putri Febri A, 2021. Konflik Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna Antara Indonesia Dengan Tiongkok. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Fisip (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini mengkaji tentang "Konflik Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna Antara Indonesia Dengan Tiongkok". Penelitian ini dilakukan berdasarkan konflik ZEE Indonesia Tiongkok yang masih belum terselesaiakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengelola konflik wilayah Perairan Natuna dengan Tiongkok, serta mengetahui strategi pertahanan Indonesia dan penanganan perbatasan wilayah Kepulauan Natuna dan juga menganalisa dampak yang ditimbulkan pada kerjasama Indonesia dengan Tiongkok atas terjadinya konflik perebutan wilayah ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan yang mana pengumpulan datannya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber pokok buku/jurnal utama sesuai topik yang diteliti dan sumber data sekunder adalah pendukung ataupun penunjang dari buku/jurnal utama. Analisinya menggunakan beberapa tahapan yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, fokus penelitian, sumber data yang dikumpulkan, membaca sumber, membuat catatan, mengelola catatan dan penyusunan laporan. Teori yang digunakan adalah teori konflik internasional, resolusi konflik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini adalah : pertama, resolusi konflik yang digunakan oleh Indonesia adalah dengan cara litigasi yang mana menggunakan pengadilan dalam permaslahan ini dan juga menggunakan cara Komunikasi Internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis dan damai. Kedua, strategi pertahanan dalam menjaga kedaulatan yang digunakan Indonesia adalah dengan cara patroli keamananan laut dan operasi pengamanan perbatasan yang dilakukan secara terkoordinasi agar lebih signifikan. Ketiga, dampak konflik wilayah ini terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok tdiak terlau signifikan karena pada era Jokowi sepertinya indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok dalam berbagai bidang.

Kata Kunci: ZEE Perairan Natuna, Konflik, Reselosi Konflik, Strategi Pertahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Putri Febri A, 2021. Zone Economic Exlcusive (ZEE) Conflict in Natuna Waters Between Indonesia and China. Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

This study examines the "Zone Economic Exclusive (ZEE) Conflict in Natuna Waters Between Indonesia and China". This research was conducted based on the unresolved ZEE conflict between Indonesia and China. The purpose of this study is to find out how Indonesia manages the conflict in the Natuna waters with China, as well as to find out Indonesia's defense strategy and handling of the border area of the Natuna Islands and also to analyze the impact on cooperation between Indonesia and China on the conflict over this territory.

The research method used in this thesis is library research where data collection uses primary and secondary data sources. The primary data source is the main source of the main book/journal according to the topic under study and the secondary data source is the support or support for the main book/journal. The analysis uses several stages, namely topic selection, information exploration, research focus, data sources collected, reading sources, making notes, managing notes and preparing reports. The theory used is the theory of international conflict, conflict resolution.

The results of this study are: first, the conflict resolution used by

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia is by means of litigation which uses the courts in this issue and also uses the method of International Communication so that it can be discussed properly, harmoniously and peacefully. Second, the defense strategy in maintaining sovereignty used by Indonesia is by way of maritime security patrols and border security operations that are carried out in a coordinated manner to make it more significant. Third, the impact of this regional conflict on diplomatic relations between Indonesia and China is not too significant because in the Jokowi era, it seems that Indonesia has focused on cooperation with China in various fields.

Keywords: ZEE of Natuna Waters Conflict, Conflict Resolution, Defense Strategy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN.....iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR LAMPIRAN..... 1

DAFTAR TABEL 2

BAB I..... 3

PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang Masalah 3

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian...... 10

E. Kerangka Konseptual 11

BAB II 29

KAJIAN TEORITIK..... 29

A. Kajian Pustaka..... 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teori 31

2.2.1 Teori Konflik 31

2.2.2 Konflik Internasional 37

BAB III 41

METODOLOGI PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian 41

B. Metode Penelitian 42

3.3.1 Sumber Data 42

3.3.2 Metode Analisis Data 43

BAB IV 45

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 45

A. Penyajian Penelitian 45

4.1.1 Pengelolaan Indonesia dalam Konflik Wilayah Perairan Natuna dengan Tiongkok 45

4.1.2 Strategi pertahanan Indonesia dan Penanganan perbatasan 50

4.1.3 Dampak Konflik Wilayah Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Tiongkok 58

B. Analisis data 64

BAB V 71

PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Batas Wilayah Perairan Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Ekslusif 17

Gambar 2. 1 Peta Nine Dish Line 31

Gambar 2. 2 Tahapan Konflik 36

Gambar 4. 1 Simbol Kerjasama Tiongkok dan Indonesia 60

Gambar 4. 2 Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Pembuatan KA Cepat Jakarta-Bandung 61

Gambar 4. 3 Spesifikasi KA Cepat Jakarta-Bandung 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kunjungan Jokowi Dalam Menghadiri APEC Economic Leaders' Meeting di Tahun 2014 Sumber dari www.medcom.id 80

Lampiran 2 Kerjasama Ekonomi Indonesia-Tiongkok Sumber Dari Berita www.Infosawit.com 80

Lampiran 3 Neraca Perdagangan Nonmigas Tahun 2019 Paling Besar Adalah Tiongkok Sumber www.Beritasatu.com 81

Lampiran 4 Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas Tahun 2021 Sumber Dari www.statistikkemendag.go.id 81

Lampiran 5 Indonesia-Tiongkok Melakukan Kunjungan Bebas Visa Sumber www.kemlu.go.id 82

Lampiran 6 Jokowi Menghadiri Kunjungan KTT G20 Tahun 2016 Sumber www.finance.com..... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Laut Tiongkok Selatan meliputi perairan dan daratan yang sangat luas. Dari gugusan Kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels. Kawasan ini terbentang dari selat Malaka hingga ke Selat Taiwan. Luas keseluruhan perairan ini mencapi 3,5 juta meter persegi. Laut Tiongkok Selatan ini jadi perairan yang rawan konflik setelah pemerintah Tiongkok mengeklaim hampir 90 persen wilayah ini. Bicara sejarah sengketa Laut Tiongkok Selatan ini muncul pertama kali pada dasawarsa 1970 berulang Kembali di dasawarsa 1980, dan terjadi lagi pada dasawarsa 1990an dan lebih memanas memasuki dasawrasa 2010 dan bahkan hingga sampai saat ini. Seperti halnya dalam pengeklaiman kepemilikan teritorial di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah Kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly kedua gugusan pulau-pulau yang tidak berpenghuni ini bisa dikata ialah titik didih utamanya. Pasalnya sudah tentu kekayaan mineral pertambangan di Kawasan gugusan pulau-pulau tersebut.[1]

Negara-negara Kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan lazimnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas Kawasan laut dan dua gugusan

[1] Administrator, "Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara," *Rabu 15 Januari* , 2020, https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara/. Diakses pada pukul 18.59 WIB tanggal 02 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepulauan tersebut. tiongkok pada Tahun 1974 mengeluarkan peta baru yang merinci klaim kedaulatan mereka terhadap perairan Laut Tiongkok Selatan atau dengan istilah *"Sembilan Garis Putus-Putus"* (Nine-Dashed Line). Legitimasi Negeri tirai bambo didasarkan pada masa lampau. Sementara itum Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia mengeklaim bahwa Sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) negara-negara tersebut berpijak pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of Sea (Unclos 1982). Indonesia sebenarnya sejak awal bukanlah negara pengeklaim. Indonesia tidak pernah mengeklaim wilayah perairan dari Laut Tiongkok Selatan yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam di satu sisi dengan Tiongkok di sisi lain. Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terhadap dua gugusan kepulauan besar di Laut Tiongkok Selatan. Namun sejak 2010 indonesia jadi "terlibat" dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan setelah Tiongkok secara sepihak mengeklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Tiongkok Selatan. Termasuk di dalamnya ialah Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yaitu, sebuah Kawasan di utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkapan ikan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan namun kemudian disusul nota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

protes pemerintah Tiongkok yang meminta kapal itu dilepaskan kasus ini terjadi di tahun 2013 dan berpuncak di tahun 2016.[2]

Pada tahun 2017 Indonesia meluncurkan peta NKRI versi baru. Peta ini menitikberatkan pada perbatasan Laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut Tiongkok Selatan diubah menjadi Laut Natuna Utara. Nama perairan yang diubah itu hanyalah wilayah laut dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sesuai Konvensi Unclos 1982.[3]

Berikut perbedaan pengambilan kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam mengatasi konflik di perbatasan Perairan Natuna.

Tabel 1. 1

Perbedaan Kebijakan Yang Diambil Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang).

No.	Presiden	Masa Pemerintahan	Kebijakan Yang Diambil
1.	**Susilo Bambang Yudhoyono[4]**	**2004 - 2014**	• Lebih menekankan pada prinsip ikatan diplomasi. • Memiliki orientasi outward (kelauar) • Memiliki visi banyak sahabat dan

[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Indra Pandapotan and Heri Kusmanto, "JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Mempertahankan Kedaulatan Di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017 The Strategy of The Indonesian Government to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Regio" 11, no. 1 (2019): 149–156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			tidak ada musuh. • Mempertahankan kedaulatan Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi. • Indonesia mengeluarkan surat resmi untuk mempertanyakan latar belakang dan dasar hukum apa Tiongkok melakukan pengeklaiman Perairan Natuna. • Indonesia membutikkan kepada Negara Dunia bahwa bisa menyelesaikan konflik secara damai dan tuntas. • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014.
2.	**Joko Widodo**[5]	**2014 - Sekarang**	• Menekankan prinsip Inward (Masuk). • Pemerintahan Joko Widodo lebih konfrotatif. • Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pengamanannya di Perairan Natuna. • Melakukan protes melalui Komisi

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Landas Kontinen PBB. • Mengeluarkan kebijakan peraturan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015 Nomor: KEP/1255/M/2015 tentang bahwasanya Perairan Natuna menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pengamanan pulau-pulau terkecil terluar/terdepan. • Melaksanakan Latihan TNI besar-besaran di Kawasan Perairan Natuna. • Melakukan pembangunan pangkalan militer untuk mengantisipasi Negara lain mengklaim wilayah Indonesia. • Melakukan pembaruan peta Republik Indonesia pada tahun 2017.

Peristiwa Deklarasi Djuanda dan pengesahan UNCLOS 1982 sangat penting dalam kasus perbatasan wilayah yang sedang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok. Pada masa Deklrasi Djuanda di tanggal 13 Desember 1975 Negara Indonesia menyatakan bahwa laut diantara pulau-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulau kita adalah wilayah Negara Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa hukum laut internasional saat itu mengakui laut teritorial hanya sejauh 12 mil laut saja. Peristiwa Deklarasi Djuanda menjadi patokan bagi para juru runding seperti Prof Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Hasjim Djalal yang mana pada saat itu sangat berjuang bertahun lamanya dalam forum diplomasi PBB hingga sampai ditandatanganinnya UNCLOS 1982 Deklarasi Djuanda sangat diperjuangkan menjadi UNCLOS 1982 untuk mengkuatkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar bagi berbagai produk di Kemaritiman yang kuat karena memiliki kompatibel dengan hukum laut internasional.[6] Deklarasi Djuanda menginformasikan kepada semua Negara bahwa wilayah laut yang ada di sekitar wilayah kepulauan Indonesia NKRI, ini adalah Isi dari Deklarasi Djuanda *"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang meghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI"*.[7] Pengesahan United Nations Covention On The Law of The Sea sudah diterima baik oleh konferensi PBB yang mana tentang Hukum Laut 3 di New York pada

[6] "Deklarasi Djuanda Dan Unclos 1982," *10 Desember*, 2018, https://jurnalmaritim.com/bulan-desember-deklarasi-djuanda-dan-unclos-1982/. Diakses pada pukul 21.13 WIB tanggal 9 Juni 2021.

[7] Bayu Galih, "Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, Dan Dampaknya," *Selasa 18 Februari*, 2020, /160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya. Diakses pada pukul 21.25 tanggal 9 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 30 April 1982 dan sudah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama 118 negara lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Selain itu Indonesia juga mengembangkan kerjasama dengan beberapa negara pantai di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara maju yang memiliki garis pantai oanjang seperti Kanada, Australia, Selandia baru, Norwegia, dan Eslandia juga dijajaki. Tiga tahun kemudian 31 Desember 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17.1985 yang berlaku secara Internasional sejak 16 November 1994. Dalam hukum Perikanan Nasional dan Internasional (2010) menjelaskan negara kepulauan yang dimaksud dalam Konvensi Hulum Laut tersebut adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepuluan maka apa yang dicita-citakan puluhan tahun sebelumnya dalam Deklarasi Djuanda sudah tunai.[8]

B. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Indonesia mengelola komflik wilayah perairan Natuna dengan Tiongkok?
2) Bagaimana strategi pertahanan Indonesia dan penanganan perbatasan wilayah kelautan di Kepulauan Natuna?
3) Apa dampak konflik wilayah ini, terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok?

[8] Irfan Teguh, "Deklarasi Djuanda Dan Ikhtiar Menyatukan Laut Indonesia," *13 Desember*, last modified 2017, https://tirto.id.deklarasi-djuanda-dan-ikhtiar-menyatukan-laut-indonesia-cbut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1). Indonesia dapat menemukan resolusi atas konflik wilayah Natuna, agar tidak lagi menjadi momok dalam permasalahan perbatasan wilayah Indonesia.

2). Meningkatkan pertahanan perbatasan Indonesia, agar wilayah kedaulatan Indonesia tidak diusik oleh negara tetangga.

3). Menjaga hubungan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok agar tetap berjalan dengan baik.

D. Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian yang hampir tercapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang sangat baik secara langsung dan tidak langsung. Manfaat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat:

   a. Memberikan sumbangan pemikiran baru dalam penyelesaian konflik di wilayah perairan Natuna.

   b. Sebagai bacaan untuk penelitian selanjutnya yang mana memiliki hubungan kesamaan tema tentang penyelesaian konflik wilayah.

2. Manfaat Praktis

   a. Menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian penulis tentang permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia dalam menyelesaikan masalah konflik perbatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembaca diharapkan dapat memperoleh informasi dari penelitian sebelumnya dan penelitian baru dari penulis dalam penyelesaian konflik perbatasan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi bacaan untuk Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang khususnya untuk program studi Ilmu Politik dan menjadi bacaan dalam mengembangkan wawasan keilmuan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik.

E. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual yaitu unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu permaalahan yang hendak diteliti.[9]

Dalam sebuah penelitian ini dibutuhkan pembatasan yang dapat menjelaskan sesuatu konsep secara singkat dan jelas, dengan demikian maka konsep dasar penelitian ini yakni:

a. Konflik

Konflik secara etimologi adalah saling memukul. Konflik juga dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, dan menganggu pihak lainnya yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar pribadi. Bunyamin Maftuh menjelaskan gagasan Morton Deutsch seorang pionir pendidikan menjelaskan tentang resolusi konflik dimana

[9] Setiadi, *Konsep Dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan* (Yogyakarta, 2013), Hlm 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan suatu hal bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individual atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan.[10] Konflik pada dasarnya berawal dari hal-hal yang bersifat abstrak, namun setelah itu konflik bisa juga berdampak kurang baik hingga ke tingkatan nyata, berupa fisik antara orang-orang yang berkonflik. Konflik terjadi diakibatkan oleh perebedaan suatu persepsi atau berlainan pendapat karena ketidaksamaan kepentingan. Konflik ada juga yang bisa diselesaikan secara tuntas ada yang tidak tuntas dan ada juga yang berbelit-belit tanpa adanya sebuah solusi. Pengelolaan konflik ini sangat dibutuhkan seperti halnya komunikasi yang sangat efektif, penyelesaian masalah, dan dapat mendorong untuk meningkatkan produktivitas jika konflik tersebut dapat dikelola dengan sangat baik, namun konflik biasanya masih ada sesuatu yang salah yang bisa merusak dan menyebabkan produktivitas drastis menurun.[11]

Konflik wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikkan/kontrol sebuah wilayah/perbatasan antara 2 ataupun lebih negara mengenai hak kepemilikkan sebuah wilayah negara setelah menguasai dari sisa Negara yang sudah tidak diakui oleh pemerintah. Konflik ini sering kali terjadi memiliki hubungan dengan hak kepemilikan sumber daya energi

[10] Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik* (Jakarta, 2010).
[11] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alm seperti sungai, tanah yang sangat produktif, sumber air ataupun minyak. Konflik bisa dinyatakan sebagai sebuah perjuangan antar individu ataupun kelompok untuk memenagkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh mereka., kalah maupun hancur dari pihak lawan bisa juga dilihat oleh yang bersangkutan untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Sangat berbeda dengan persaingan ataupun kompetisi yang mempunyai tujuan utama untuk mencapai kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang sedang bersaing, hingga dalam konflik yang tujuannya merupakan penghancuran pihak lawan. Maka dari itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang hendak dicapai seringkali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang adalah sebuah perluasan dalm suatu konflik individu maupun kelompok yang sering terjadi secara berulang. Suatu konflik fisik atau perang biasanya berhenti untuk sementara, karena harus ada jeda untuk istirahat agar dapat melepaskan kelalahan, apabila jumlah korban pihak lawan sudah seimbang dengan jumlah korban pihak sendiri. Sesudah dilakukannya untuk istirahat, konflik bisa diteruskan atau diulang lagi pada waktu atau kesempatan lain.[12]

Konflik Internasional ialah salah satu konflik yang kerap terjadi di dunia, baik Negara berkembang atau Negara maju sehingga

[12] Konflik Sosial, "Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya 1" 30, no. 2 (2006): 138–150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perihal permasalahan ini hendak terjalin perang yang besar dan sangat merugikan banyak orang tentunya.[13]

b. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

ZEE merupakan kawasan yang luasnya mencapai 200 mil dari garis tepi laut, kawasan tersebut suatu negara pantai memiliki hak atas kekeyaaan alam yang ada di dalamnya serta berhak memakai kebijakan hukumnya, kebebasan berlayar, penerbangan, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa di dasar laut.[14]

Zona Ekonomi Ekslusif Republik Indonesia, NKRI mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh Republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 56 ayat 1 dan pasal 60 ayat 5)[15]:

1) Hak berdaulat untuk melakukan observasi dan 150 Gea. penggunaan, pelestarian, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan observasi dan lingkungan laut, dan hak Negara lain; penggunaan, pelestarian, dan pengelolaan

[13] Imboh Prasetyo, "3 Contoh Konflik Internasional Yang Menghebokan," *23 Agustus* 2019, diakses pada hari jum'at 15 Jui 2021 pukul 16.54 WIB. Https://hukamnas.com/contoh-konflik-internasional.

[14] Joko Dwi Sugihartono, "Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut," *Jurnal Saintek Maritim* Volume XVI (2018), Hlm 43.

[15] Ardigautama Agusta et al., "Analisis Undang-Undang Kelautan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 147" (1982): 147–152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber kekeyaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eskplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

2) Yurisdiksi bertujuan untuk eksklusif atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan.
3) Yurisdiksi eksklusif atas riset ilmiah kelautan..
4) Yurisdiksi eksklusif atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
5) Penetapan zona keselamatan yang pantas (tidak boleh lebih dari 500 m yang diukur dari setiap titik terluar) di sekeliling pulau buatan, instalasi, dan bangunan.

NKRI di zona ekonomi eksklusif adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 60 ayat 3 dan pasal 61)[16]:

1) Pemberitahuan sebagaimana mestinya tentang pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, serta zona keselamatan yang ditetapkan dengan pertimbangan tidak mengganggu alur laut untuk pelayaran internasional,

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan pulau buatan, instalasi, dan/atau bangunan.
3) Melakukan pembongkaran instalasi dan bangunan yang sudah tidak terpakai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran, penangkapan ikan,
4) Menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang di perbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.
5) Bekerja sama dengan organisasi internasional berwenang (subregional, regional maupun global) yang bertujuan unutk pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan definisi Konflik dan ZEE diatas dapat disimpulkan bahwa konflik dalam riset ini adalah konflik perebutan antar dua negara mengenai hak kepemilikan Zona Ekonomi Ekslusif yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai suatu negara untuk mneguasai/memiliki hak atas kekayaan alam dan menggunakan kebijakan hukumnya di wilayah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

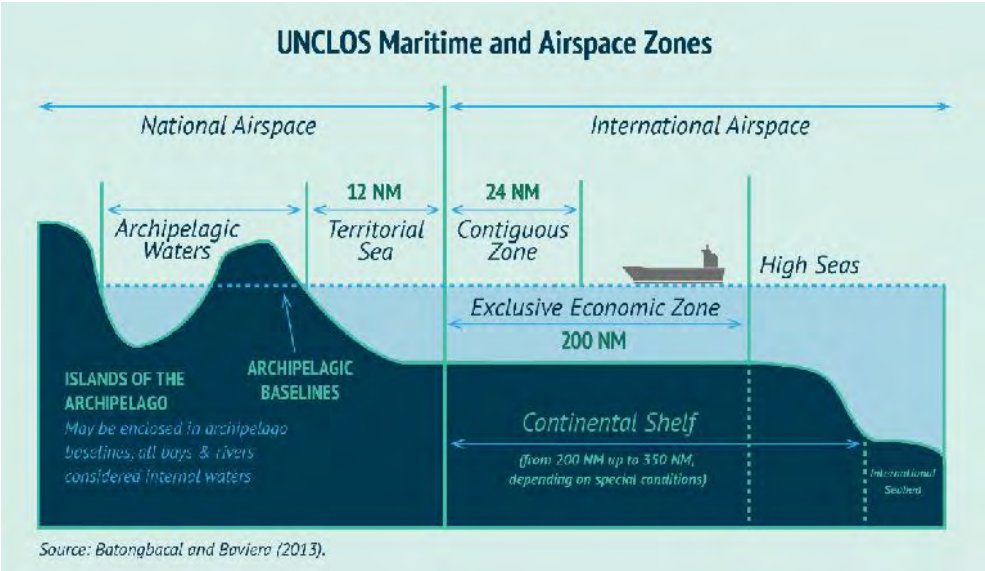

Gambar 1. 1 Batas Wilayah Perairan Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Ekslusif

c. Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat dipahami bahwa hubungan antar Negara yang menggunakan instrument kelengkapan Negara, yang bisa dikenal dengan perutusan atau perwakilan Negara dan lebih familiar sebagai perwakilan diplomatik. Banyak berbagau bidang yang menjadi dasar untuk setiap Negara dalam melakukan kerja sama dan hubungan yang memiliki sifat multilateral ataupun bilateral akan menunjang kepentingan Negarannya. Dasar hubungan diplomatik antar Negara secara global berpatokan pada Konvensi Wina di Tahun 1961 berisi tentang hubungan diplomatik yang di dalamnya terdiri atas Mukadimah, 2 Protokol serta 53 Pasal.[17]

d. Resolusi Konflik

[17] Arif Apriadi, "Kedudukan Hubungan Diplomatik Antar Negara Dalam Perizinan Hak Lintas Terbang Atas Negara Lain," *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Malang* (2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resolusi konflik yaitu memiliki makna yang berbeda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Menurut Webster Dictionary, "resolusi adalah Pertama, tindakan mengenai suatu permasalahan, Kedua, pemecahan, Ketiga, penghapusan atau penghilangan permasalahan".[18] Menurut Weitzman dalam Morton & Coleman 2000, "mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together)"[19]. Menurut Mindes, "resolusi konflik merupakan kemampuan untuk meyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan"[20]. Resolusi konflik memberikan solusi yang sangat demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada pihak yang berkonflik, cara untuk dapat memecahkan permasalahan mereka sendiri yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kategori bijak, netral dan tentunya bersikap adil dalam membantu masalah dari pihak yang sedang berkonflik.

Penyelesaian masalah atau bisa disebut dengan resolusi konflik adalah membangun intelektual agar bisa memahami

[18] Merriam Webster, *The Merriam-Webster Dictionary*, 2004.
[19] MSP Dr. Irene Silviani, *Komunikasi Organisasi* (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020).
[20] CQ Press, *Worldwide Government Directory With International Organization* (Universitas Michigan, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang sedang terjadi di dalam suatu konflik dan bagaimana melakukan penmebusan di dalamnya. Eksepsinya pemahaman dan penembusan dalam suatu konflik tentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang sedang berkonflik dalam konteks sosial, aspirasi mereka, dan seabagainya. Implikasi paling penting adalah kerjasama dan kompetisi karena orientasi kooperatif atau menang untuk menuntaskan suatu konflik sangat bisa memfalisitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetetif atau menang kalah menghalanginya. Lebih gampang untuk mengembangkan dan memelihara sikap memamg jika mempunyai dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berupa teman, rekan kerja dan komunikasi.[21]

e. Strategi Konflik Pertahanan Wilayah dan Penanganan Perbatasan.

Strategi berawal dari konsep militer serta kata itu sendiri juga berasal dari Bahasa Yunani, yang artinya kepemimpinan atas pasukan, seni pelopor pasukan. Pertimbangan strategis tetap memainkan peranan kala sekelompok besar orang butuh dipimpin dan diberi pengarahan. Menurut Firmanzah, “strategi adalah sesuatu yang penting baik dari segi sumber daya yang dikorbankan maupun efeknya pada organisasi secara

[21] Peter T. Coleman Dkk, *Resolusi Konflik Teori Dan Praktek* (Bandung: Nusa Media, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan tentu saja harus dicatat bahwa masing-amasing orang akan mendefinisikan secara berbeda mengenai mana yang penting dan tidak penting"[22]. Menurut Schroder, "strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik"[23]. Berupa struktur dan peraturan baru dalam pengadministrasian pemerintah yang dijalankan program deregulasi, privat dan desentralisasi. Strategi politik ialah wacana berupa taktik, Teknik, dan cara seorang politisi untuk mempertahankan asal kekuasaan yang dirumuskan untuk melaksanakan keputusan politik yang diinginkan.[24]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini peneliti melakukan pencarian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai perbandingan. Baik kekurangan dan kelebihan. Peneliti juga menggali informasi dari jurnal dan sarana literatur yang serupa lainnya dalam rangka memperoleh informasi sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pradipta Budhihadma dan Adis Imam Munandar pada tahun 2021, dengan judul **"Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara".** Penelitian ini menjelaskan bahwa kedaulatan

[22] Firmanzah, PH. D, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006).
[23] Rizky Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong Dan KPK Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
[24]Surahmadi "STRATEGI PEMENANGAN POLITIK PASANGAN IDZA-NARJO DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BREBES PERIODE 2012-2017 Surahmadi" 7, no. 2 (2017): 91–111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sangat penting dan paling utama dalam menentukkan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Dalam permasalahan konflik Pulau Natuna pemerintah Indonesia tetap terus maju kedepan untuk menjadi patokan kebijakan Kawasan karena bersinggungan dengan kepentingan.[25]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019, dengan judul **"Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok".** Penelitian ini membahas bagaimana strategi untuk menyelesaiakn suatu masakah adalah dengan cara konsoliasi yang bermanfaat untuk hubungan Kemitraan Strategis diantara kedua negara dalam upaya dukungan diplomasi. Indonesia-Tiongkok setuju untuk meningkatkan kerjasama dalam hal ekonomi, politik dan sosial budaya.[26]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jason Arley F, dengan judul **"Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Tiongkok Pasca Konflik Laut Natuna Periode 2016-2019."** Penelitian ini lebih menjelaskan dasar yang digunakan oleh Tiongkok saat

[25] Ahmad Pradipta B & Adis Imam M, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* Volume 13. (n.d.): Hlm 91.

[26] Sri Wahyuni, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesain Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok," *Jurnal Sosioreligius* Volume 2 Nomor 2, Hlm 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeklaim sebagaian perairan laut Natuna Utara adala peta yang dikeluarkan oleh Tiongkok yang disebut Nine Dash Line peta tersebut merupakan 9 garis imajiner yang menjadi dasar Tiongkok atas klaimnya dan juga mempunyai alasan historis/sejarah peta dengan garis putus-putus ini disebutkan sudah ada sejak zaman kekaisaran Tiongkok.[27]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tri Handika dan Alliya Nur A pada tahun 2017, dengan judul **"Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Jokowi: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? Pada tahun 2017".** Penelitian ini mengarah kepada ketegangan Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna tidak mempengaruhi kerjasama di bidang ekonomi antara kedua negara karena di kerjasama bidang ekonomi Tiongkok-Indonesia menjalin kerjasama yang praktis untuk peningkatan hubungan investasi dan perdagangan internasional.[28]
5. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ricky Usman pada tahun 2017, berjudul **"Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan 2012-2016".** Penelitian ini lebih berfokus pada politik luar negeri Indonesia dalam permasalahan Tiongkok Indonesia

[27] Jason Arley F, "Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Tiongkok Pasca Konflik Laut Natuna Tahun 2016-2019," *Skripsi Universitas Komputer Indonesia* (2019): Hlm 14.
[28] Muhammad Tri Andika and Universitas Bakrie, "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo : Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan ?" 2, no. 2 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat bereperan aktif sebagai penengah antara Negara Asia dan Tiongkok dalam penggunaan berdasarkan UNCLOS 1982.[29]

6. penelitian yang dilakukan oleh Butjie Tampi, dengan judul **"Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kebijakan Yuridis)".** Penelitian ini membahas tentang Kepulauan Natuna memiliki sumber kekayaan alam yang mana tidak heran jika Negara tetangga sangat inisiatif untuk mendapatkannya. Wilayah laut Tiongkok memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu negara Tiongkok terutama ASEAN dan meliputi masalah teritorial, pertahanan dan keamanan.[30]
7. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ela Riska, berjudul **"Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Ilegal Fishing) Oleh Nelayan China Di ZEE Kepulauan Natuna".** Penelitian ini mengarah ke claimant states, yaitu Tiongkok berupaya untuk menegaskan klaimnya melalui state practices di Tiongkok selatan, dari hal aktifitas penangkapan ikan laut hingga militer. Akhirnya perspektif Indonesia merupakan illegal fishing. Indonesia memanfaatkan instrument diplomasi maritim yang

[29] Ricky Usman, "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal FISIP* Vol., 4 No 2.
[30] Joenil Kahar and Cyber Media, "Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017 Jurnal Hukum Unsrat Tampi B : Konflik Kepulauan Natuna ....." 23, no. 10 (2017): 1–16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperankan oleh maritim forces Indonesia dan unsur pemerintahan. Diplomasi maritim dapat diimplementasikan melalui mekanisme forum ditingkat bilateral, regional maupun global.[31]

8. Penelitian yang dilakukan oleh E. Estu Prabowo, dengan judul **"Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kaus Konflik DiLaut Tiongkok Selatan)".** Penelitian ini mengarah kepada pemerintahan Indonesia lebih mengedepankan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Indonesia sangat mencolok dalam penengah permasalahan perairan Tiongkok dengan solusi perdamaian. Tetapi dalam hal ini kebijakan pertahanan masih belum imbang untuk ditempuh.[32]
9. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Hendra Maujana Saragih, berjudul **"Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan".** Penelitian ini menjelaskan dibawah kepemimpinan Jokowi Indonesia saat ini menjalankan aksi sepihak untuk memperkuat Indonesia di Perairan Natuna, Indonesia juga meningkatkan militer dan kerjasama ekonomi.

[31] Ela Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Illegal Oleh Nelayan China Di ZEEi Perairan Kepulauan Natuna," *Artikel Diplomasi Pertahanan* (2017).
[32] E Estu Prabowo, "KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konfl Ik Di Laut Cina Selatan)," no. 3 (2013): 117–129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi Indonesia belum efektif dalam menangani masalah Perairan Natuna dengan Tiongkok.[33]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ardigautama Agusta, dengan judul **"Analisis Undang-Undang Kelautan Zona Ekonomi Ekslusif".** Penelitian ini lebih menekankan bahwa negara lain memiliki hak dan kewajiban di ZEEI NKRI, yaitu menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Kewajibannya adalah memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai yang memiliki ZEE dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut.[34]
11. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Deni dan Lukman Sahri, dengan judul **"Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Dilaut China".** Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dinaungan Jokowi telah melakukan diplomasi preventif dan mengeluarkan diplomasi poros maritim dunia sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia khususnya ZEE Natuna

[33] Hendra Maujana Saragih, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. VIII, (2018): Hlm 55-56.
[34] Ardigautama Agusta, "Analisis Undang-Undang Kelautan Di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif," *Jurnal Pendidikan Geografi* Volume 17. (n.d.): Hlm 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Indonesia juga mengadakan dialog informal dengan Tiongkok.[35]

12. Penelitian yang dilakukan oleh Faridh Ma'aruf Legionosuko, Helda Risman pada tahun 2020, dengan judul **"The Rationality Of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggresiveness In The Claims Of The North Natuna Sea".** Penelitian ini menjabaran pengembangan hubungan strategis dan kompleks antar aktor melalui sinergi Langkah kebijakan engangement antar aktor merupakan strategi pilihan bagi Indonesia. Indonesia dianggap sebagai pemmpin alami ASEAN karena, dapat membangun dan memperkuat sentralitas ASEAN sebagai pemain di kawasan yang stabil dan kuat. Indonesia dapat membangun keterlibatan yang kompleks dengan Tiongkok dan pendekatann tidak langsung dengan The Quad sebagai aktor penyeimbang di Kawasan asia.[36]
13. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Wahyu Wicaksana pada tahun 2015, dengan judul **"Indonesia In The South China Sea: Foreign Policy And Regional Order".** Penelitian ini membahas Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk

[35] Fitra Deni dan Lukman Sari, "Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Laut Natuna," *Jurnal International & Diplomacy* 3, no. 1 (n.d.): Hlm 19-10.
[36] Helda Risman Fraidh Ma'aruf, Tri Legionosuko, "The Raionality of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggresiveness in the Claims of the North Natuna Sea," *Technium Social Sciences* 8 (n.d.): Hlm 583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

borkntribusi melalui promosi agenda normatif dalam organisasi ASEAN. Indonesia telah mengajukan berbagai inisiatif untuk menyelesaikan sengketa anatara negara-negara penentu untuk mencegah perselisihan regional menjadi arena konstentasi antara Wangsiton dan Beijing yang siginifikan, karena itu Indonesia terus mencari formula untuk solusi keamanana ASEAN.[37]

Penelitian ini adalah *"Konflik Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok"*. Fokus penelitian ini adalah studi kasus konflik ZEE pulau Natuna Indonesia dengan Tiongkok. YPenelitian ini akan mengkaji apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik perbatasan wilayah Natuna antara Indonesia dengan Tiongkok, strategi pertahanan apa yang diberikan pemerintah untuk menjaga wilayah kelautan dan bagaimana dampak kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji apa saja Tindakan yang sudah diambil oleh pemerintah, khususnya diera Joko Widodo ini dalam mengatasi konflik berkepanjangan antara Indonesia dan Tiongkok, mengingat hubungan kerjasama indnesia dengan Tiongkok semakin erat diera pemerintahan Jokowi ini.

G. Sistematika Pembahasan.

[37] I Gede Wahyu Wicaksono, "Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order" (*Jurnal Global Strategis, No.2, Th 13*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil yang baik dan mudah dipahami seperti berikut ini:

Bab Pertama : bagian ini yaitu lebih memabahas pendahuluan yang mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan Pustaka dan teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kepustakaan yang dirujuk dari Pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada teori baru.

Bab Ketiga : menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti jenis penelitian, tahap penelitian dan teknik penelitian.

Bab Keempat : membahas tentang penyajian data dan analisis data.

Bab Kelima : berisikan Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

Konflik Perairan Tiongkok adalah isu kemanan regional yang samapai kini masih belum mencapai titik terang penyelesaian, serta sangat rawan menganggu stabilitas kawasan di masa yang akan dating. Sengketa ini awal mula terjadi di karenakan klaim sepihak Negara Tiongkok yang mengeluarkan peta nine dash line yang mana peta tersebut merupakan 9 garis imajiner yang menjadi dasar Tiongkok atas klaimnya dan Tiongkok juga menggunakan alasan historis/sejarah peta dengan garis putus-putus ini disebutkan sudah ada dalam jaman kekaisaran Tiongkok dan memperluas wilayah perairannya hingga wilayah Negara Filipina, Taiwan, Vietnam, Darussalam, dan Malaysia.[38] Tiongkok sangat mengupayakan dan menegaskan klaimnya diantaranya melalui state practice di Tiongkok selatan, mulai dari aktifitas penangkapan ikan hingga militerisasi.[39] Kepulauan Natuna memiliki sumber kekayaan alam yang mana tidak mengherankan jika negara-negara tetangga sangat tergiur untuk memilikinya.[40] Dibawah kepemimpinan Jokowi Indonesia terus menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di kepulauan Natuna, baik melalui pengitiman tenaga militer dan

[38] Adityo Arifianto, "Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna" (n.d.): 11–22.
[39] Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Illegal Oleh Nelayan China Di ZEEi Perairan Kepulauan Natuna."
[40] Butjie Tampi, "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan Tiongkok (Kebijakan Suatu Yuridis)," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, no. 10 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan kegiatan ekonomi yang diarahkan negara. Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dalam sengketa kepemilikan laut Tiongkok Selatan yang mana berperan aktif sebagai moderator antara Tiongkok dan Negara Asia dalam penggunaan berdasarkan UNCLOS 1982. Pemerintah Jokowi telah melakukan diplomasi preventif dan mengeluarkan diplomasi poros maritim dunia sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia khususnya ZEE Natuna dan Indonesia juga mengadakan dialog.[41] Pertahanan dalam negara adalah elemen yang sangat penting dalam lingkungan sebuah negara. Menjaga keutuhan wilayah dan juga kedaulatan negara, tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Pemerintah Indonesia juga memiliki pemikiran untuk melakukan terobosan kebijakan maritim yang cukup signifikan dan implikatif secara regional pada media tahun lalu, yaitu dengan diluncurkannya kebijakan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017.[42] Peta baru tersebut ditandatangani pada 14 Juli 2017 oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama 21 kementrian dan Lembaga negara terkait. Salah satu yang baru dalam peta itu adalah penamaan Laut Natuna Utara. Indonesia memiliki Peraturan hukum laut didasarkan pada hasil ratifikasi dari Hukum Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan

[41] Sari, "Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Laut Natuna."
[42] Frans E. Likadja, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982.[43]

Gambar 2. 1 Peta Nine Dish Line

B. Kerangka Teori

2.2.1 Teori Konflik

Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis berhubungan atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling mengkait-kaitkan yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas diantara variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Teori harus mengandung konsep, pernyataan, definisi, baik itu definisi teoritis maupun operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan logis antara konsep tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam teori di dalamnya harus terdapat konsep, definisi dan

[43] Ramdhan Muhaimin, "Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Politica* 9, no. 1 (n.d.): Hlm 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proposi, hubungan logis di antara konsep-konsep tersebut. Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria pertama, kriteria ideal yang menyatakan bahwa suatu teori akan dapat diakui jika memenuhi persyaratan. Kedua, yaitu kriteria pragmatis yang menyatakan bahwa ide-ide itu dapat dikatakan sebagai teori apabila mempunyai paradigma, kerangka piker, konsep, variabel, proposi, dan hubungan antara konsep dan proposi.[44]

Dalam fenomena interkasi dan interelasi sosial antar individu maupun antar kelompok, terjadinya konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar. Konflik dianggap sebagai gejala alamiah yang dapat berakibat negatif maupun positif tergantung bagaimana cara mengelolanya. Persoalan konflik tidak perlu dihilangkan tetapi perlu dikembangkan karena merupakan sebagai bagian dari kodrat manusia yang menjadikan seseorang lebih dinamis dalam menjalani kehidupan. Adanya konflik terjadi akibat komunikasi yang tidak lancar, tidak adanya kepercayaan serta tidak adanya sifat keterbukaan dari pihak-pihak yang saling berhubungan. Konflik semangat serta kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, dan ditinggalkan, karena kelebihan beban kerja atau kondisi yang tidak memungkinkan.[45]

---

[44] Muhammad Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 Januari 2017.
[45] Simon et all Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan atau perbedaan, pertentangan yang berlawanan dengan berselisih. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI konflik mempunyai arti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.[46]

Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali menyeruak sebagai hakikat yang dikonotasikan negatif. Deksripsi tentang polemic sudut pandang dasar konflik tergambar melalui perspektif yang dibangun turner berikut: *conflict is thus designed to resolve dualism. It is away to axheving some kind of unity, even if it be through the annihilation of one of the conflicting parties. This is roughly parallel to the fact that it is the most violent symptom of a disease which repsesents the effort of the organism to free itself of distrubances and damages caused bye them.*

Senada atas peryataan Turner di atas, Wes Sharrock dalam Pip Jones menjelaskan bahwa pandangan konflik di bangun atas dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagai sebagian orang tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas ditekan. Oleh sebab itu, perbedaan kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya dengan kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai, dan sebagian besar masyarakat diorganisasi sedemikian sehingga masyarakat tersebut

[46] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya memberikan manfaat lebih besar bagi sebagian warga lain yang tidak mendapatkan kemudahan. Konseptualisasi dari konflik sebagaimana dijelaskan oleh Turner diatas menunjukkan bahwa secara realistis konflik dapat saja berimplikasi kepada ketidak nyamanan pada suatu perspektif, namun pada sisi lain hakikatnya merupakan anti thesis yang bisa menimbulkan solusi atas suatu problematika sosial.[47]

Teori konflik muncul sebagai sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950an dan 1960an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Didalam konflik selalu ada negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu consensus. Menurut teori konflik masyarakat disatukan dengan "paksaan". Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat

[47] Mas'udi, "AKar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel," *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3 Nomor 1 (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.[48]

Hakikat konflik dan resolusi konflik adalah hubungan sebab dan akibat yang tidak dapat dipisahkan. Konflik berasal dari kata kerja latin yaitu *confligere* yang berarti saling memukul. Menurut Kartono dan Gulo bahwa konflik memiliki arti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil implus-implus, Hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Gama mengatakan bahwa perspektif konflik merupakan satu aspek penting dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yaitu membahas tentang dominasi suatu kelompok individu terhadap kelompok individu lainnya, karena itu secara umum teori konflik adalah menafsirkan interaksi sosial dalam bentuk pergulatan bukan kerja sama.[49]

a) Tahapan-Tahapan Konflik

Dalam memahami konflik Simon Fisher Membagi konflik menjadi empat tahapan diantaranya[50]:

[48] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."
[49] Dewi Wulansari, *Konsep Dan Teori* (Refika Aditama, Sosiologi, 2013).
[50] Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2. 2 Tahapan Konflik

1. Tahapan Pra Konflik, tahapan pra konflik pihak yang bertikai sudah ada ketidaksamaan atau ketidaksesuaian mengenai sesuatu hal, sehingga menimbulkan konflik, tetapi masih belum sampai kepermukaan atau diketahui oleh orang umum. Salah satu pihak menyadari kalau konflik ini kemungkinan akan meningkat menjadi konfrontrasi.
2. Konfrontasi, tahap ini konflik menjadi semakin terbuka, pertikaian kadang terjadi dan para pendukung sudah melakukan aksi demonstrasi dan perilaku konfrontatif lainnya. Masing-masing pihak mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekarasan. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang mengarah pada polarisasi di antara pendukung masing-masing pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Krisis, tahapan ini ketegangan/kekerasan terjadi. Dalam konflik ini skala besar merupakan skala perang. Komunikasi terputus dan bahkan sudah saling terbunuh.
4. Pasca Konflik, sudah sampai pada mengakhiri berbagai konfrontasi dan kekerasan, ketegangan berkurang dan sudah mengarah pada situasi normal. Namun tidak di tutup kemungkinan jika perselisihan yang terjadi tidak diselesaikan dengan baik, maka situasi akan kembali pada tahapan prakonflik.

2.2.2 Konflik Internasional

Konflik internasional pada abad ke-20 ini berdasarkan 4 komponen yaitu: kelompok yang bertentangan, bidang masalah yang di pertentangkan, sikap, dan tindakan. Keempat komponen ini akan memberi suatu dasar untuk menilai keefektifan sarana yang dipakai guna menyelesaikan konflik internasional.[51] Masalah-masalah yang umum yang sering dihadapi dalam konflik internasional a) wilayah territorial, b) tindakan diplomatic, c) propaganda, d) ancaman dan sanksi militer. Penyebab konflik internasional ada 7 tipe[52]:

1) Konflik teritorial terbatas, dalam konflik ini terdapat pertentangan posisi yang menyangkut pemilikan territorial,

[51] Dr. Juwuno Sudarsono, *K.J. Holsti Politik Internasional: Kerangka Analisa* (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1987).
[52] Ibid hlm 597-598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya klaim suatu negara terhadap suatu daerah yang berada di atau dekat wilayah negara lain. Masalah kedaulatan atas minoritas etnik juga sering dihubungkan dengan klaim suatu negara untuk mengontrol wilayah tersebut, dan oleh karena itu maka disebut konflik territorial terbatas.

2) Konflik yang terutama karena susunan pemerintahan, yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi tentang siapa sebenarnya pemerintah yang abash di negara tersebut. Masalah ideologi merupakan masalah pelengkap dalam hal ini.
3) Konflik yang diakibatkan oleh usaha suatu negara untuk mempertahankan haka tau privelse mereka atau suatu territorial negara lain demi mempertahankan dan melindungi kepentingan keamananya.
4) Konflik karena kehormatan nasional, pada konflik ini pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan beberapa pelanggaran. Suatu negara mungkin saja meningkatkan beberapa insiden yang tadinya relative kecil menjadi krisis dan besar.
5) Konflik karena imperialism terbatas, pada konflik ini suatu pemerintah ingin menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya karena alasan kombinasi dari tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Konflik karena pembebasan atau perang revolusioner oleh suatu negara untuk membebaskan masyarakat negara lain.
7) Konflik yang timbul sebagai akibat dari usaha suatu negara untuk mempersatukan negara yang terpecah-belah.

Pada tahap awal sebelum terjadinya konflik atau krisis internasional mungkin saja terjadi protes, penolakan, penyangkalan, tuduhan, ancaman atau tindakan simbolis lainnya, dan karena itu cara penyelesainnya masih mungkin berupa perundingan formal.[53]

Cara-cara yang ditempuh bagi pemecahan masalah konflik dan krisis internasional ini bahwa konflik mungkin saja diselesaikan dengan cara-cara penaklukan, yaitu tanpa adanya sedikitpun cara-cara diplomatik, tetapi dipaksa menyerah tanpa syarat. Sedangkan kompromi hanyalah salah satu dari 6 cara penyelesaian konflik. Sementara 5 lainnya adalah menghindar atau mengubah sikap secara sukarela, penaklukan dengan cara kekerasan, memaksa tunduk atau penangkalan yang efektif, menyerah, dan penyelesaian pasif. Perubahan secara sukarela, penghindaran dan penyelesaian pasif biasanya juga lebih dapat dicapai melalui kebijaksanaan unilateral daripada negosiasi formal. Apabila akan menyelesaikan konflik harus melihat bagaimana prosedurnya, terutama yang menyangkut kompromi dan penyerahan. Ada 3 prosedur yang dapat mengatur pelaksanaan kompromi dan penyerahan, yaitu 1. Negosiasi bilateral atau multilateral antar pihak yang terlihat langsung, 2. Mediasi dimana pihak

[53] Ibid hlm 602-603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga yang tidak punya kepentingan langsung dengan masalah yang disengketakan ikut campur-tangan dalam proses tawar-menawar, 3. Adjukasi dimana pihak ketiga yang independent menentukkan suatu penyelesaian dengan menawarkan beberapa tipe penyerahan.[54]

Penyelesaian konflik internasional juga bisa dilakukan dengan cara[55]:

a) Negosiasi langsung antar pihak yang terlibat merupakan suatu prosedur yang sama tuanya dengan konflik antar negara itu sendiri. Esensi dari proses tawar-menawar meliputi: penentuan komitmen atas posisi penting, penentuan masalah dimana konsensi dibuat, persiapan ancaman dan janji-janji (meskipun sebagai gertakan saja), dan tetap sabar.
b) Mediasi sebagai inovasi untuk Menyusun prosedur bagi penyelesaian seluruh konflik dan pertentangan internasional baru berhasil setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Prinsip baru yang penting dalam ketentuan PBB ini adalah, masyarakat internasional berhak dan wajib untuk ikut campur dalam konflik internasional dan karena itu pihak yang bersengkata juga wajib menyerahkan persengketaan mereka kepada PBB agar diselesaikan secara damai, baik melalui negosiasi bilateral maupun menyerahkannya kepada "Permanent Court of International Justice".

[54] Ibid hlm 614.
[55] Ibid hlm 618.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Menurut Mardalis, "Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah"[56]. Termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library, search*) yaitu pertama, dengan mencatat semua tenatng motivasi konsumsi secara umum di setiap pembahasan penelitian yang dihasilkan dalam literatur, sumber dan penemuan terbaru mengenai sikap motivasi konsumsi yang bisa mempengaruhi. Kedua, memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru di sikap konsumen pada pasar. Ketiga menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran yang berbeda.[57]

Dalam penelitian ini penulis melakukan penerapan metode penelitian kepustakaan dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasar. *Pertama*,

[56] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
[57] Mirshad Z, "Persamaan Model Pemikiran Al-Ghaza Dan Abraham Maslow Tentang Model Motivasi Konsumsi," *Tesis UIN Sunan Ampel* (2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data tidak hanya bisa didapatkan dilapangan. Tetapi sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen lain dalam bentuk tulisan, jurnal, buku, dan literatur yang lain. *Kedua*, penelitian kepustakaan diperlukan sebagi salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, yang kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk meyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. *Ketiga*, kepustakaan tetap andal untuk menjawab persoalan penelitinya. Bagaimanapun informasi atau data empiric yang dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku, laporan ilmiah maupun laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.[58]

B. Metode Penelitian

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berasal dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu buku tentang Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Iternasional dan K.J. Holsti Politik Iternasional Kerangka Analisa. Artikel Jurnal yang

[58] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*., (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan juga diambil sesuai judul yang dibuat agar relevan sesuai judul yang diambil, karena menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data sebagai penunjang data pokok yaitu buku/artikel, dokumen penting seperti Undang-Undang yang membahas tentang perbatasan wilayah laut dan web berita berperan sebagai pendukung buku atau artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/artikel primer. Penguatan sumber sekunder dalam penelitian ini seperti halnya mengambil dan mencari dari dokumen penting seperti Undang-Undang yang membahas perbatasan wilayah laut dan web yang bersangkutan tentang konflik Pulau Natuna sebagai berikut: Kemenlu, Indonesia.go.id, berita Kompas, berita Merdeka, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, berita Kumparan, Wikipedia.[59]

3.3.2 Metode Analisis Data

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian kepustakaan, antara lain:

1. Pemilihan topik, dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada.
2. Eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian
3. Fokus penelitian, berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan.

[59] Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)", Tesis (Dosen FKIP Unpas April 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber data yang dikumpulkan, yaitu berupa informasi atau data empiric yang bersumber dari buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
5. Membaca sumber, kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif harus bisa memperoleh data yang maksimal dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide baru yang terkait dengan judul yang diteliti.
6. Membuat catatan, penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian.
7. Mengelola catatan, penelitian semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan.
8. Penyusunan laporan, dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku.[60]

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Penelitian

4.1.1 Pengelolaan Indonesia dalam Konflik Wilayah Perairan Natuna dengan Tiongkok

Konflik ini bermula dari Tiongkok yang memiliki permasalahan perbatasan wilayah dengan beberapa Negara di Asia yang membuat PBB mengutus Indonesia untuk menjadi negara penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. Indonesia khawatir jika masalah ini terjadi di perairan Indonesia dan memang nyatanya Tiongkok merembet pengeklaiman wilayahnya ke Perairan Natuna Selatan dengan membuktikan dokumen, hak hukum dan sejarah yang dimiliki oleh Tiongkok agar memperkuat pengeklaimannya dalam merebut Natuna. Akhirnya Indonesia pun melakukan kajian kebijakan dan strategi dalam mengatasi konflik perbatasan ini. Yang mana Indonesia juga tetap mempertahankan hak dalam kepemilikan wilayah perairan yang dimiliki Indonesia dengan memberitahukan dokumen-dokumen pendukung jika batas yang di klaim oleh Tiongkok ada hak milik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi permasalahan ini juga langsung mengkirimkan surat resmi apa fakta yang dilakukan Tiongkok untuk mengklaim Natuna dan juga menggunakan hubungan diplomatic dalam mengatasi ini. Dalam pemerintahan Joko Widodo lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertegas komunikasi internasional, membuktikan dokumen-dokumen penting untuk memperkuat data dan fakta jika Natuna masih milik Indonesia dan melakukan pelatihan militer untuk lebih waspada dan juga berjaga-jaga.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini Indonesia memiliki beberapa hal yang harus ditempuh seperti halnya: Upaya penyelesaian secara litigasi dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan, Upaya non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa yang melibatkan Indonesia dengan Tiongkok dalam wilayah perairan Natuna tentunya sudah banyak hal yang dilakukan agar kedua negara ini mengakhiri sengketa yang dipersengketakan.[61] Melakukan penyelesaian ini juga bisa dilakukan dengan komunikasi Internasional yang mana Indonesia dalam menghadapi dampak sengketa perairan Natuna pemerintah Indonesia melakukan pendekatan *idealistic humanistic* dengan jalur diplomasi. Indonesia memiliki komunikasi yang baik dan harmonis dalam mencapai perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Natuna dengan Tiongkok sangat netral dan tidak memihak. Gaya komunikasi pemerintah Indonesia mengandung prinsip

[61] Dimas Agung Firmansya Rizal Dwi Novianto, "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Communace* 3 No. 1 (2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip yang dianut oleh Indonesia sudah berdiri lama sejak 1945 yang mana memiliki arti penting stabilitas kemanan dunian dan Kawasan. Tahun 1960 Indonesia mengeluarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai tindak lanjut dari pembukuaan UUD 1945.[62] Politik luar negeri Indonesia dalam konflik perairan Natuna ini memiliki 4 pendekatan yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi dan pendekatan kerjasama ekonomi. Pendekatan geopolitik yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Indonesia mulai menyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi yaitu, pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari barat ke timur. Negara-negara Asia sedang bangkit perekonomian dan perkembangan teknologi. Indonesia harus membangun kembali budaya maritim Indonesia harus ditingkatkan bukan hanya paradigma pembangunan darat. Dalam berbagai bidang paradigma pembangunan laut juga harus ditingkatkan seperti yang telah dilakukan dan dimulai dari struktur pemerintah serta kesiapan SDMnya. Pelaut Indonesia menjadi bagian terpenting karena sebagi subyek yang mampu menggerakkan apa saja dan merupakan potensial yang wajib dilibatkan sejak awal hingga perencanaan. Indonesia perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang

[62] Jurnal Dinamika Pemerintahan, "KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI" 3, no. 2 (2020): 147–159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (Maritim Domain Awareness/MDA).[63]

Sikap Indonesia dalam menghadapi klaim batas wilayah maritime RRT di Laut Tiongkok Selatan bertitik tolak dari berbagai kepentingan nasional Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang meliputi: kepentingan vital (survival) dan kepentingan utama (major). Kepentingan vital yang meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yuridiksi nasional merupakan "harga mati" NKRI. Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah yuridiksi RI yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Tujuan untuk *eksplorasi, eksploitasi,* pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan WNI yang beraktivitas do perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan. Kepentingan utama (*major*) terjaminnya keamanan maritime (*maritime security*), prakarsa dalam penganggulangan *Transnational Organized Crime* di Kawasan Laut Tiongkok Selatan, keamanan lingkungan (*environmental security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat Internasional yang menggunakan perairan di Kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional.[64]

---

[63] Adityo Arifianto, *Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna*, (Artikel Prosiding Konferensi Nasional Ke-7, Jakarta 2018).
[64] Dr. Surya Wiranto, *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan Dari: Perspektif Hukum Internasional*, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian sengketa laut Natuna selatan setidaknya dapat didasarkan dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa Natuna selatan tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut Indonesia menerapkan pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.[65] Perwujudan perdamaian dunia stabilitas regional merupakan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan dan ditegakkan. Dalam konteks tersebut, kerjasama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di dunia melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkrit dan bermatabat.[66] Kerjasama pertahanan dilaksanakan dalam lingkup kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Pada lingkup regional kerjasama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya Kawasan regional yang stabil melalui upaya

[65] Departemen Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008).
[66] Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, (Jurnal Peneletian Politik Volume 11, No. 2 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama antarnegara dikawasan. Prioritas kerjasama pertahanan adalah dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan Kawasan regional yang stabil. Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam mendudukkan para negara pengeklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena stabilitas Kawasan Asia Tenggara berikut Laut Tiongkok Selatan merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi negara-negara anggota ASEAN tetapi juga bagi mitra ASEAN mengingat Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur laut utama bagi lalu lintas perdanganan Asia Timur.[67]

4.1.2 Strategi pertahanan Indonesia dan Penanganan perbatasan

Indonesia dalam melakukan strategi pertahanan dalam penyelesaian konflik ini memiliki alat pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai komponen utama pertahanan bertugas menjaga kedaulatan NKRI. TNI harus menyadari akan adanya perang hibrida yang sedang terjadi, bahwa kondisi lingkungan strategis di Kawasan Natuna selatan sangatla dinamis dan memungkinkan eskalasi bisa terjadi. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi yang tepat guna menangkal serangan jenis tersebut. dalam strategi pertahanan laut atau maritim kekuatan pertahanan maritim sangatlah diperlukan, apapun kondisinya tanpa adanya kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu bertahan ataupun menyerang agresi kapal musuh. Setidaknya jika Indonesia tidak mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan pertahanan. Bertahan adalah cara paling efektif mengamankan kedaulatan wilayah perairan laut. Bertahan adalah bentuk terkuat dari sebuah pertarungan dibandingkan dengan serangan.[68] Keamanan nasional merupakan konsep yang dimiliki oleh sebuah negara yang berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer. Keamanan nasional merupakan tugas utama sebuah negara dalam meniadakan ancaman yang kemudian dituangkan dalam strategi pertahanan negara. Sesuai dengan perkembangan ancaman dewasa ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan ancaman yang bersifat militer dan nirmiliter tetapi, menggunakan kekuatan militer.

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia Tenggara. Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyebut strategi ini sebagai suatu "keseimbangan dinamis" dan melalui strategi ini Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara Cina dan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan di antara kedua negara itu. Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap yang terlihat tidak konssiten dengan kepentingan

[68] M. Bahtiar Fajri, Alfin Febrian B, Khanisa dkk, *Perang Dan Damai: Situasi Politik Di Era Ketidakpastian*., (Jurnal Penelitian Politik Vol.17, No. 1, Juni 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sendiri dalam isu tertentu. Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna, sebuah pulau yang akan kaya akan gas alam dimana wilayah itu tumpang tindih dengan wilayah yang diakui sebagai kedaulatan Tiongkok. Langkah Indonesia ini merupakan tanggapan terhadap apa yang dianggap sebagai "ancaman Tiongkok" terhadap kedaulatan Indonesia yang "cepat atau lambat" akan berdampak pada Indonesia. Jakarta mengatakan akan merumuskan "kebijakan netral" terhadap Tiongkok, di tengah memanasnya ketegangan ketika beberapa pejabat mengkritik Tiongkok karena mengeklaim wilayah zona ekonomi ekslusif Indonesia yang berdekatan dengan Natuna sebagai wilayah Tiongkok. Penekanan terhadap posisi netral ini dating sesudah Tiongkok menyatakan "tak keberatan" terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Natuna. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan tidak aman jika kita mengabaikan kemungkinan ancaman yang akan terjadi di masa depan. Indonesia memperkuat kapasitas militer untuk mengantisipasi berbagai ancaman, baik pencurian ikan atau masuknya Tiongkok ke wilayah Indonesia secara illegal. Angkatan darat, laut dan udara Indonesia telah menyusun strategi untuk memperkuat pertahanan di Natuna. Pihak militer mengatakan sedikitnya ada tambahan satu battalion untuk memperkuat pangkalan laut yang sudah ada di Natuna. Indonesia juga berminat untuk bergabung dengan latihan perang gabungan dengan Amerika diwilayah ini. Sudah dua kali dilakukan pelatihan bersama Amerika di Batam yang berjarak 480 km dari Natuna. Latihan ini termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan pengawasan dan pesawat patrol, seperti penggunaan pesawat P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal di permukaan dan kapal selam. Pemerintah Indonesia sudah menghabiskan US$ 14,2 Juta (Rp 196 Milliar) untuk memperkuat pangkalan militer di pulau Natuna. Pemerintah Indonesia membantah jika penguatan ini merupakan antisipasi terhadap peningkatan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, tetapi pemerintah Indonesia lebih suka menyebutnya sebagai "Diplomasi Pertahanan".[69]

Konsep pertahanan berlapis ini mengdepankan kekuatan TNI khususnya TNI-AL. Tindakan militer untuk menghadang serangan atau agresi negara lain dalam rangka *preemptive* dilaksanakan dengan mengarahkan kekuatan TNI sejauh mungkin sebelum musuh memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Pertahanan militer untuk menghadapi agresi musuh yang telah masuk wilayah Indonesia dilaksanakan dalam susunan pertahanan mendalam dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk mencegat dan menghancurkan kekuatan militer lawan dari luar batas ZEE hingga masuk ke pantai dan daratan wilayah Indonesia. Diartikan bahwa TNI-AL adalah matra lapis pertama dan berada pada posisi terluar di dalam konsep pertahanan Indonesia. Transisi kekuatan matra TNI terjadi di pantai, agar semua elemen Republik Indonesia dapat saling memberikan dukungan dalam menghadapi kemungkinan terburuk berupa serangan musuh. Unsur *sea power* terakhir yang dicetuskan adalah karakter pelabuhan, seperti kuantitas dan kualitas

[69] Hendra Maujana Saragih, *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan"*, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VIII No. 1/Juni 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelabuhan. Unsur-unsur ini akan melengkapi sebagai kesatuan *sea power* yang membentuk kekuatan Angkatan Laut yang kuat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini menuntut Indonesia unutk membangun infrastruktur maritim yang memadai unutk meningkatkan perkembangan ekonomi, distribusi logistic yang merata, kemudahan transportasi, dan mobilisasi pertahanan negara. Pangkalan militer berfungsi sebgai tempat pertahanan utama dan titik fokus mobilisasi di wilayah tersebut. selain itu, pangkalan militer juga mempermudah pihak militer untuk melakukan pemantauan wilayah disekitarnya. Kemudian pelabuhan yang dibangun akan mempermudah alur suplai logistik terhadap kebutuhan militer seperti ditribusi bahan bakar, makanan dan ransum, serta kebutuhan lainnya. Dengan operasi logistik yang efesien militer dapat meringankan beban persediaan dan perlatan untuk memangkas *waste*. Dengan unsur *sea power* dan alutsista yang dipenuhi dengan baik, maka Indonesia melalui TNI-AL telah memilikidaya tawar yang cukup untuk melakukan *noval diplomacy* dalam konflik laut cina selatan. istilah *noval diplomacy* mengacu pada penggunaan instrumen kekuatan Angkatan laut suatu negara, seperti kapal perang dan alutsista lain, untuk mendukung kebijakan luar negeri negara tersebut dan untuk melakukan penyerangan atau penembakan senjata. Upaya ini melibatkan penggunaan Angkatan laut dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti: komunikasi intens, penerjunan kekuatan langsung sebagai upaya negosiasi dalam sebuah krisis, konflik, atau secara lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum untuk meningkatkan daya tawar suatu negara. Selain itu *noval diplomacy* melalui Angkatan laut juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam pemilihan opsi penawaran kerjasama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan memperlihatkan kekuatan tersebut sebagai unsur pendukung atau kekuatan yang mewakili tugas tertentu yang diberikan negara terhadap angakatan laut tersebut.[70]

Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis. Konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan unutk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter dan untuk menghadapi perang berlarut. Fungsi penangkalan merupakan strategi yang dilaksanakan pada masa damai, dan merupakan integrase usaha pertahanan yang mencakup instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi dan militer. Konsep penangkalan terdapat dua macam strategi penangkalan, yaitu penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan

[70] R. Wing Witjahyo O. W. P., "Upaya Defensive Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Di Era Joko Widodo," *Jurnal Hubungan Internasiona* XII No. 2 (2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemabalasan. Konsekuensi dari pelaksanaan strategi penangkalan dengan cara penolakan ini adalah pembangunan sistem pertahanan yang berbasis alat utama sistem senjata (alusista) yang canggih dan andal serta mampu memiliki daya penggetar (defferent effect) yang kuat. Sementara penangkalan dengan cara pembalasan dilaksanakan jika suatu negara tidak memiliki sistem pertahanan militer berbasis alusista ideal dan dilaksanakan dengan cara peperangan yang berlarut menggunakan strategi gerilya. Dengan berbagai pertimbangan, maka startegi penangkalan Indonesia, merupakan gabungan dari penangkalan dengan cara penolakan dan dengan cara pembalasan berupa pertahanan melingkar multilapis dengan pusat kekuatan dukungan rakyat atas peran TNI sebagai kekuatan utama.[71]

Strategi pertahanan Laut Nusantara merupakan doktrin perang laut TNI AL yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi TNI AL sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara. Sasaran yang ingin dicapai oleh Strategi Pertahanan Laut Nusantara adalah tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan menganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, tertanggulanginya setiap bentuk ancaman aspek laut serta berbagai bentuk gangguan keamanan dalam enegeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI hingga terciptanya kondisi laut yuridksi nasional yang terkendali (termasuk ketiga

[71] Kemeterian Pertahanan RI, “Strategi Pertahanan Negara”. (Jakarta 2007), hlm 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air laut kepulauan). Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, diterapkan strategi pertahanan laut nusantara, yaitu[72]:

a. Strategi penangkalan (Deterence Strategy) dilakasanakan melalui diplomasi angkatan laut, kejadiran di laut, serta pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL.
b. Strategi pertahanan berlapis (Layer Defence Strategy) dilaksanakan pada masa perang dengan mengedepankan pola operasi tempur laut gabungan matra laut dan udara dengan mengerahkan seluruh kekuatan komponen maritim.
c. Strategi pengendalian laut (Sea Control Strategy) dilaksanakan unutk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri, mencegah penggunaan laut oleh lawan serta meniadakan seluruh ancaman aspek laut dari dalam negeri dengan pola operasi laut sehari-hari.

TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas-tugas pertahanan matra laut, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau Kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan Kawasan strategis, dimana pendekatan lebih mengedepankan aspek

[72] Basri M, Supartono, & Rayanda B, "Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". (*Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol. 4, Nomor 2. 2018*), hlm 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosporetiy dengan memperhatiakn aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan beberapa hal seabagai berikut[73]:

a. Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia termasuk dimaksudkan untuk melaksanakan patroli ruitn dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). "Pameran Bendera" atau *show of flag* seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan *coersive* tetapi merupakan sebuah *noval diplomacy* yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. kegiatan ini juga diarahkan untuk mendekati masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil.
b. Operasi Pengamanan Perbatasan operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terakit melalui patrol terkoordinasi.

4.1.3 Dampak Konflik Wilayah Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Tiongkok

Indonesia adalah negara kepualauan yang memiliki banyak pulau tersebar dari sabang sampai marauke, Indonesia salah satu negara yag memiliki keanekaragaman hasil kekayaan alam. Potensi inilah yang membuat banyak negara ingin bekerjasama dengan Indonesia termasuk

[73] Arsetio, "Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XVII, No. (2013): Hlm 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang penduduknya sangat padat di dunia sedangkan Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Tiongkok dan Indonesia memiliki banyak kerjasama dibidang-bidang yang memang diperlukan hanya saja lebih meningkat di bidang ekonomi. Ada beberapa perjanjian dalam kerjasama Indonesia dan Tiongkok diantaranya 7 bidang ini yang sudah ditandatangani:

1) Nota kesepahaman kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
2) Nota kesepahaman kerjasama proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
3) Nota kesepahaman kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementrian Transportasi RRT.
4) Kerjasama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pajak ganda kedua negara.
5) Kerangka kerjasama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
6) Nota kesepahaman kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Nota kesepahaman kerjasama bidang industry dan infrastruktur antara Kementrian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.[74]

Gambar 4. 1 Simbol Kerjasama Tiongkok dan Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dalam permasalahan perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Tiongkok tidak ada pengaruh signifikan terhadap kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok. Walaupun masalah konflik wilayah ini masih berkepanjangan dan belum menemukan titik terang untuk kedua belah negara. Tetapi hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok tetap memiliki hubungan yang erat dalam beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi yang mana kerjasama dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tetap berjalan baik. Menteri Indonesia Erick Thohir (BUMN), Muhammad Lutfi (Mendag), Retno Marsudi (Menlu) mengikuti pertemuan bilateral yang bertujuan menggaet investor asing untuk beriventasi di Indonesia. Kedua, indonesai dan Tiongkok akan lebih mendalami kesepakatan hubungan kerjasama yang sudah berjalan dari

[74] Laurensia Theodora, "Hubungan Bilateral Yang Terjalin Antara Indonesia Dengan China." www.kumparan.com diakes pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 yaitu Bilateral Economic and Trade Coorperation (BETC) menjadi Trade and Invesment Framework Agreement (TIFA) yang mana akan menjadi jenjang perdangangan jauh lebih tinggi Dalam hubungan kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga sudah dimulai pengerjaan di tahun 2016. Proyek ini dijadwal 2021 akan dibuka tetapi ada kondisi yang tidak meungkinkan yaitu Covid-19 akhirnya ditunda terlebih dahulu.[75]

Gambar 4. 2 Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Pembuatan KA Cepat Jakarta-Bandung

[75] Thea Fathanah, "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung," *29 Juni*. www.cnbcindonesia.com. Diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. 3 Spesifikasi KA Cepat Jakarta-Bandung

Indonesia-Tiongkok tiga tahun terakhir ini sangat meingkat dalam investasi sektor industri logam, indsutri listrik, dan pembangunan infrastruktur publik. China juga menyambut baik Indonesia untuk mengabil manfaat dalam pola pembangunan yang baru, memperkuat kerjasama pragmatis diantara kedua negara dalam berbagai bidang dan mensinergikan inisiatif "Belt and Road dengan visi Indonesia tentang "Global Maritim Fulcrum" sehingga dapat menempa kualitas yang lebih tinggi dan cakupan kerjasama yang lebih luas. Kedua negara ini meminta tetap terus mempromosikan kerjasama dalam proyek-proyek infrastruktur pembangunan jalur kereta api Jakarta-Bandung, mewujudkan proyek utama seperti koridor ekonomi Kawasan yang komperhensif dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru seperti dalam kerjasama energi dan maritim yang baru serta memperkuat kerjasama digital. Tiongkok juga menyambut Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk berkualitas ke Tiongkok dan mendukung perusahaan Tiongkok meningkatkan investasi di Indonesia.

Jokowi juga melakukan kunjungan dalam masa pemerintahannya sejak 2014 ke negara Tiongkok[76]:

1) 8-12 November 2014 Joko Widodo menghadiri APEC Tiongkok konferensi internasional pertamanya.
2) 25-28 Maret 2015 Joko Widodo melakukan kerjasama bebas visa untuk masyarakat Indonesia yang mengunjungi Tiongkok. Joko Widodo juga melanjutkan perjalanan ke kota Sanya buat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Belanda Mark Rutte dan menyampaikan pidato utama.
3) 2-6 September 2016 Joko Widodo menghadiri KTT G20 Hangzhou serta bertemu Xi Jinping bersama CEO Alibaba Jack Ma.
4) 14-15 Mei 2017 Joko Widodo menghadiri Belt and Road Forum pertama serta menandatangani kemitraan strategis komperhensif 5 tahun Indonesia Tiongkok bersama Xi Jinping.

[76] Artikel Wikepedia, "Daftar Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo," www.wikepedia.com. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 14.23 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis data

Dalam analisis data akhir ini akan dilakukan proses membandingkan, menggabungkan dan memilah pengertian hingga ditemukan yang relevan. Permasalahan yang ada pada konflik perbatasan wilayah ini ada beberapa penyelesaian yang bisa digunakan dalam pembahasan tugas akhir ini. Awal mula konflik perbatasan wilayah laut Indonesia dan China memiliki 4 tahapan diantaranya[77]:

a. Pra konflik, ketidaksesuaian dalam suatu hal atau permasalahan yang sudah terjadi, yang mana negara China membuat pernyataan bahwa Natuna utara masuk dalam bagian wilayah mereka. China membuktikan dengan membuat garis nine dish line didalam peta dan juga memperkuat pengetahuan sejarah yang ada. Indonesia lalu angkat bicara jika dalam peta Indonesia tidak ada garis nine dish line tetapi mengapa dalam peta dunia ada garis nine dish line muncul yang akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian dan salah paham yang saling tumpang tindih. Permasalahan perbatasan wilayah ini tidak hanya terjadi antara Tiongkok dan Indonesia tetapi di seluruh Asia Tenggara. Indonesia tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini tetapi Indonesia adalah negara penengah di Asia Tenggara. Pengakuan batas wilayah laut yang dimiliki oleh Tiongkok masuk dalam perbatasan wilayah laut Indonesia,

[77] Simon Fisher, "*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*". (Jakarta The British Council, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya pemerintah Indonesia menekankan bahwa perbatasan yang diakui china adalah miliki Indonesia.

b. Konfrontasi, permasalahan semakin menjadi terbuka. Permasalahan yang dimiliki Tiongkok dalam pengakuan batas wilayah laut yang masuk di perbatasan Indonesia sangat meresehakan Indonesia karena, perbatasan wilayah laut Indonesia masuk di dalam batas Zona Ekonomi Ekslusif yang memiliki banyak sumber daya laut dan kekeyaan alam. Indonesia pun harus memperkuat akan permasalahan perbatasan ini. Konflik semakin terbuka dan saling mencari pendukung dalam memperkuat statement negara masing-masing. Tiongkok mengumpulkan pendukung untuk memperkuat garis nine dish line yang mereka buat dan sejarah yang mereka miliki sedangkan Indonesia memiliki garis hukum internasional yang mana memang batas wilayah laut ini masuk dalam wilayah Indonesia.

c. Krisis, skala perang. Konflik ini pada awalnya tidak memicu perang yang sangat besar karena dari pihak pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan hubungan diplomasi agar tidak terjadi konflik secara berkelanjutan. Tetapi semua itu tidak sesuai yang diperkirakan. Tiongkok melakukan kesalahan dalam permasalahan ini yaitu Tiongkok masuk perbatasan wilayah Indonesia tanpa izin dan melakukan pengambilan sumber daya alam yang sering dipergokki oleh petugas laut Indonesia. Indonesia pun melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas dengan bijaksana yang awalnya ditegur dengan baik-baik dan mengatakan jika Tiongkok masuk wilayah laut Indonesia tanpa izin. Tiongkok masih saja melanggar berkali-kali yang membuat petugas laut semakin geram dan akhirnya Menteri kelautan melakukan pengeboman kapal Tiongkok yang membuat geger seluruh Indonesia.

d. Pasca konflik, ketegangan berkurang dan sudah mengarah pada situasi normal. Konflik yang terjadi dikarenakan Tiongkok mengakui perbatasan wilayah laut Indonesia dan masuk tanpa izin pemerintah Indonesia pun melakukan ketagasan dengan cara pengemboman kapal jika tidak sesuai aturan yang dimiliki Indonesia. Ketegangan konflik ini akhirnya bisa mereda untuk sementara karena konflik ini masih berlanjut dengan cara diplomasi yang masih tidak tahu titik terangnya.

Suatu permasalahan tidak mungkin terjadi secara langsung tetapi disetiap permasalahan pasti ada sebab akibat yang terjadi, maka Fisher Simon, Jawed Ludin tidak salah memiliki pernyataan bahwa konflik terjadi karena ada beberapa tahapan yang dilakukan secara sesuai dan terjadi. Konflik juga memiliki beberapa jenis Menurut Soetopo, "diantaranya konflik tujuan, konflik peranan, konflik konflik nilai, konflik pertentangan politik, dan konflik yang bersifat Internasional".[78] Konflik yang sedang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok masuk dalam jenis konflik tujuan

[78] Soetopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan konflik yang bersifat Internasional. *Konflik tujuan* adalah 2 tujuan kompetetif (persaingan) bahkan kontradiktif (berlawawan) konflik antara Indonesia dan Tiongkok masuk dalam jenis konflik tujuan karena ada kompetetif dari pihak Tiongkok yang ingin mengakui wilayah laut Indonesia menjadi milik Tiongkok dan kontradiktif di pihak Indonesia karena Indonesia tidak ingin terlibat konflik ini tetapi Indonesia harus mempertegas perbatasan wilayah laut yang masuk di wilayah Indonesia. Jenis konflik dalam permasalahan ini juga masuk *Konflik yang bersifat Internasional* terjadi karena perbedaan kepentingan yang berpengaruh kepeda negara. Konflik yang sedang terjadi ini masuk dalam konflik bersifat Internasional pertama, terjadi antara 2 negara Asia. Kedua perbedaan kepentingan yang Tiongkok ingin mengakui perbatasan wilayah laut yang dimiliki Indonesia sedangkan Indonesia menjadi penengah dan tetap mepertegas batas wilayah yang dimiliki Indonesia agar tidak terjadi konflik secara berkepanjangan. Penyebab konflik internasional juga bisa menjadi patokan mengapa permasalahan ini bisa terjadi seperti halnya konflik teritorial terbatas yang mana konflik ini terjadi karena ada tantangan posisi yang menyangkut pemilikan teritorial, seperti mengeklaim suatu negara terhadap suatu daerah yang berada di atau dekat wilayah negara lain. Konflik Indonesia dan Tiongkok terjadi karena pengeklaiman wilayah perairan yang bukan miliknya.[79]

[79] Dr. Juwono Sudarsono, "*K.J. Holsti Politik Internasional: Kerangka Analisa"*. (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hlm 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu konflik memiliki banyak faktor yang ditumbulkan. Permasalahan antara Tiongkok dan Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya konflik seperti: 1. Dua pihak maupun kelompok terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan Indonesia dan Tiongkok berlawanan dalam mencapai tujuan yang diinginkan Indonesia memiliki interaksi dengan Tiongkok untuk memperkuat hubungan kerjasama lebih jauh lagi sedangkan Tiongkok masih memikirkan untuk meyakinkan bahwa Natuna masuk dalam batas wilayah mereka. 2. Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan Indonesia dan Tiongkok memiliki tujuan yang berbeda yang akhirnya bertentangan dalam suatu interaksi yang dibutuhkan masing-masing negara. 3. Akibat tidak keseimbangan seharusnya Tiongkok harus mengetahui fakta yang ada dan mencari data yang sesuai agar tahu bahwa Natuna masuk dalam wilayah Indonesia dan tidak ada lagi kesalapahaman yang berkelenjutan tentang batas wilayah dan lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok lebih diperkuat lagi.[80]

Didalam strategi penanganan keamanan ada beberapa macam yang bisa digunakan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah yaitu, strategi penangkalan, strategi pertahanan, dan strategi pengendalian laut. Jika itu diterapkan kemungkinan bisa berjalan dengan baik. Disuatu penyelesaian pasti ada strategi yang harus dilakukan tetapi disini juga harus memiliki pirnsip dalam menyelesaikan masalah, karena jika dalam

[80] Hendriks, Wlliam, "*Bagaimana Mengelola Konflik*". (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan masalah diimbangi dengan prinsip pasti bisa menemukan jalan tengah untuk cepat menyelesaikan. Beberapa prinsip yang bisa digunakan dalam penanganan masalah diantarannya: Prinsip Itikad yang mana dalam prinsip itikad ini dari kedua pihak harus bisa mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara yang bersengketa. Prinsip hukum internasional tentang kedaulatan dalam prinsip ini pihak kedua negara harus bisa menaati dan melaksanakan kewajiban internasional fundamental integritas wilayah negara. Beberapa prinsip itu bisa digunakan dalam permasalahan pulau Natuna antara Indonesia dan Tiongkok.[81]

Dampak yang disebabkan jika terjadimya konflik adalah keretakan hubungan antara kedua Negara dan muncul unsur dominasi. Indonesia dan Tiongkok memang sedang mempertahankan satu sama lain dalam wilayah yang sedang disengketakan tetapi Indonesia dan Tiongkok tidak mau terkecoh dan sangat professional dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena kedua Negara ini saling membutuhkan yang akhirnya lebih mengedepankan kerjasama antara kedua Negara ini. Bisa menengahi dalam menyelesaikan masalah yang memang harus diselesaikan dan dipertahankan untuk kerjasama jangka panjang. Karena jika kedua Negara ini lebih fokus ke permasalahan ini maka semuanya akan terbengkalai dan malah menimbulkan konflik berkepenjangan dan tidak tereselesaikan. Maka dari itu Indonesia dan Tiongkok menjalankan keduanya secara

[81] Ramlan Surbakti, "*Memahami Konflik Politik*". (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seimbang. Mengatasi konflik juga harus ditekankan karena sangat berpengaruh seperti meningkatkan komunikasi diantara kedua Negara dan mengidentifikasi masalah untuk mengupayakan kebenaran dalam suatu masalah. Kerjasama dalam suatu hubungan sangat penting karena sangat menguntungkan kedua pihak maka dari itu kedua pihak ini sangat produktif dalam mengedepankan kerjasama dalam berbagai bidang untuk mengunggulkan kedua negara masing-masing.[82]

Konflik antara Indonesia dan Tiongkok dalam Zona Ekonomi Ekslusif di perairan Natuna ini memang terjadi dan ada tahapan yang sudah mereka lewati. Permasalahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi ada penyebab awal yang memang mengkaitkan Negara Asia termasuk Indonesia. Sesuai teori yang dijelaskan memang terjadi dalam konflik ini dan memperkuat permasalahan yang ada. Dalam cara penyelesaianpun memang sudah dikerjakan tetapi belum tepat yang akhirnya masih berkelanjutan sampai sekarang untuk menemukan jawaban dalam penyelesaian ini. Jadi sampai saat ini hubungan antara kedua negara ini masih berjalan baik dan terus melakukan hubungan diplomasi dan kerjasama yang sangat intensif. Karena kedua negara ini tidak mau mengkesampingkan kerjasama yang bisa membuat negara masing-masing lebih berkembang dan jauh lebih meningkat. Kedua negara ini juga tidak membiarkan konflik ini terus berkepanjangan tetapi masih mencari jalan tengah apa yang harus bisa dilakukan dan disahkan agar masalah ini cepat selesai.

[82] Hendriks, William, "*Bagaimana Mengelola Konflik*". (Jakarata: Bumi Aksara, 2001), hlm 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan Tiongkok adalah dengan cara litigasi yang mana menggunakan pengadilan dalam permasalahan ini karena kedua Negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional dimana Indonesia melakukan ini agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik yaitu pertahanan dan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi.
2. Strategi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan perbatasan wilayah sangat penting untuk mempertahankan Indonesia, karena jika dilakukan keduanya pasti akan berjalan seimbang. Strategi pertahanan yang digunakan Indonesia adalah dengan cara patroli keamanan laut dan operasi pengamanan perbatasan yang sering dilakukan secara terkoordinasi agar lebih jauh signifikan.
3. Dampak konflik wilayah ini terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan Tiongkok tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas kerjasama dalam berbagai bidang. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diajukan saran yang bisa dilakukan untuk lebih menambahkan solusi yang bisa diterapakan. Indonesia harus tetap memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi di negara Indonesia kita sendiri. Indonesia harus mengetahui sejauh mana tahap penyelesaian konflik antara Indonesia dan Tiongkok ini terjadi, karena jika pemerintah selalu memperhatikan jalannya perkembangan konflik ini pasti akan tahu tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik berjalan dengan baik. Jadi tahap-tahap penyelesaian konflik harus dicoba satu-persatu karena pasti ada jalan keluarnya jika masih tidak bisa diselesaikan pasti ada rencana selanjutnya agar cepat terselesaikan. Pemerintah juga harus tetap waspada dan berhati-hati setiap menjalankan tugas dan memberikan ketagasan dalam kerjasama maupun penyelesaian konflik yang terjadi dengan Tiongkok. Untuk Angkatan Laut juga harus berjaga-jaga dan tetap memberikan komunikasi yang baik akan perkembangan perbatasan di Pulau Natuna, lalu pemerintah juga terus memberikan arahan kepada Angkatan Laut apa yang masih kurang dalam penjagaan perbatasan laut terluar, agar pemerintah memberikan fasilitas yang baik dan lebih canggih untuk tugas pemantuan perbatasan laut, ketahanan dan keamanan wilayah terluar Indonesia harus ditingkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bisa mencegah dan terhindar klaim dari negara-negara lain juga. Pemerintah Indonesia harus fokus dalam pertahanan yang sudah dilakukan karena pertahanan dan keamanan yang bisa membantu jauh dalam permasalahan konflik ini.

Indonesia juga bisa melakukan partisipasi dengan negara-negara lain dalam permasalahan Pulau Natuna agar menemukan jalan keluar yang solutif. Indonesia juga harus aktif dan kreatif dalam menjaga dan membudidayakan sumber daya energi yang ada pada di Pulau Natuna. Karena bisa memberikan mata pencaharian masyarakat sekitar dan harus dijaga karena sumber daya alam perlu dimanfaatkan dengan baik . Indonesia juga harus tetap mengedepankan penyelesain konflik ini dengan cara metode diplomatik agar tidak menganggu kerjasama keduannya serta untuk berupaya menjaga perdamaian internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dkk, Peter T. Coleman. *Resolusi Konflik Teori Dan Praktek*. Bandung: Nusa Media, 2016.

Dr. Irene Silviani, MSP. *Komunikasi Organisasi*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Firmanzah, PH. D. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Fisher, Simon et all. *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, 2000.

Hermawan. *Media Pembelajaran SD*. Bandung: Upi Press, 2007.

Likadja, Frans E. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Maftuh, Bunyamin. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Jakarta, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Miall, Hugh. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, 1994.

Press, CQ. *Worldwide Government Directory With International Organization*. Universitas Michigan, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, Dr. Juwuno. *K.J. Holsti Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.

Setiadi. *Konsep Dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta, 2013.

Wulansari, Dewi. *Konsep Dan Teori*. Refika Aditama, Sosiologi, 2013.

Webster, Merriam. *The Merriam-Webster Dictionary*, 2004.

Wiranto Surya. Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari: Perspektif Hukum Internasional. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.

JURNAL

Administrator. "Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara." *Rabu 15 Januari*.

Agusta, Ardigautama. "Analisis Undang-Undang Kelautan Di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif." *Jurnal Pendidikan Geografi* Volume 17. (n.d.): Hlm 151.

Agusta, Ardigautama, Analisis Undang-undang Kelautan, Wilayah Zona, and Ekonomi Eksklusif. "Ardigautama Agusta. Analisis Undang-Undang Kelautan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 147" (1982): 147–152.

Andika, Muhammad Tri, and Universitas Bakrie. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo : Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan ?" 2, no. 2 (2017).

Apriadi, Arif. "Kedudukan Hubungan Diplomatik Antar Negara Dalam Perizinan Hak Lintas Terbang Atas Negara Lain." *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Malang* (2019).

Arifianto, Adityo. "Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna" (n.d.): 11–22.

Arsetio. "Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Btas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* XVII, No. (2013): Hlm 16-17.

Dkk, Peter T. Coleman. *Resolusi Konflik Teori Dan Praktek*. Bandung: Nusa Media, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. Irene Silviani, MSP. *Komunikasi Organisasi*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.

F, Jason Arley. "Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Tiongkok Pasca Konflik Laut Natuna Tahun 2016-2019." *Skripsi Universitas Komputer Indonesia* (2019): Hlm 14.

Fathanah, Thea. "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung." *29 Juni*.

Febari, Rizky. *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong Dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Firmanzah, PH. D. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Fisher, Simon. *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2002.

Fisher, Simon et all. *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, 2000.

Fraidh Ma'aruf, Tri Legionosuko, & Helda Risman. "The Raionality of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggresiveness in the Claims of the North Natuna Sea." *Technium Social Sciences* 8 (n.d.): Hlm 583.

Galih, Bayu. "Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, Dan Dampaknya." *Selasa 18 Februari*. Last modified 2020. /160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya.

Kahar, Joenil, and Cyber Media. "Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017 Jurnal Hukum Unsrat Tampi B : Konflik Kepulauan Natuna ....." 23, no. 10 (2017): 1–16.

Likadja, Frans E. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

M, Ahmad Pradipta B & Adis Imam. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* Volume 13. (n.d.): Hlm 91.

Maftuh, Bunyamin. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Jakarta, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Mas'udi. "AKar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx Dan George Simmel." *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3 Nomor 1 (2015).

Muhaimin, Ramdhan. "Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara." *Jurnal Politica* 9, no. 1 (n.d.): Hlm 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandapotan, Indra, and Heri Kusmanto. “JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Mempertahankan Kedaulatan Di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017 The Strategy of The Indonesian Government to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Regio” 11, no. 1 (2019): 149–156.

Pemerintahan, Jurnal Dinamika. “KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI” 3, no. 2 (2020): 147–159.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, 1994.

Prabowo, E Estu. “KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konfl Ik Di Laut Cina Selatan),” no. 3 (2013): 117–129.

Prasetyo, Imboh. “3 Contoh Konflik Internasional Yang Menghebokan.” *23 Agustus*. Last modified 2019. https://hukamnas.com/contoh-konflik-internasional.

Press, CQ. *Worldwide Government Directory With International Organization*. Universitas Michigan, 2006.

R. Wing Witjahyo O. W. P. “Upaya Defensive Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Di Era Joko Widodo.” *Jurnal Hubungan Internasiona* XII No. 2 (2019).

Riska, Ela. “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Illegal Oleh Nelayan China Di ZEEi Perairan Kepulauan Natuna.” *Artikel Diplomasi Pertahanan* (2017).

Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansya dkk. “Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Communace* 3 No. 1 (2020).

Saragih, Hendra Maujana. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. VIII, (2018): Hlm 55-56.

Sari, Fitra Deni dan Lukman. “Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Laut Natuna.” *Jurnal International & Diplomacy* 3, no. 1 (n.d.): Hlm 19-10.

Setiadi. *Konsep Dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta, 2013.

Sosial, Konflik. “Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya 1” 30, no. 2 (2006): 138–150.

Sudarsono, Dr. Juwuno. *K.J. Holsti Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.

Sugihartono, Joko Dwi. “Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut.” *Jurnal Saintek Maritim* Volume XVI (2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tampi, Butjie. “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan Tiongkok (Kebijakan Suatu Yuridis).” *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, no. 10 (2017).

Teguh, Irfan. “Deklarasi Djuanda Dan Ikhtiar Menyatukan Laut Indonesia.” *13 Desember*. Last modified 2017. https://tirto.id.deklarasi-djuanda-dan-ikhtiar-menyatukan-laut-indonesia-cbut.

Theodora, Laurensia. “Hubungan Bilateral Yang Terjalin Antara Indonesia Dengan China.”

Tualeka, Muhammad Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (n.d.).

Usman, Ricky. “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan.” *Jurnal FISIP* Vol., 4 No (n.d.).

Wahyuni, Sri. “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesain Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok.” *Jurnal Sosioreligius* Volume 2 N (n.d.): Hlm 35.

Webster, Merriam. *The Merriam-Webster Dictionary*, 2004.

Wikimedia, Artikel. “Daftar Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo.” www.wikepedia.com.

Wiranto, Dr. Surya. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan Dari: Perspektif Hukum Internasional*. 1st ed. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.

Wulansari, Dewi. *Konsep Dan Teori*. Refika Aditama, Sosiologi, 2013.

Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).” Unpas, n.d.

Z, Mirshad. “Persamaan Model Pemikiran Al-Ghaza Dan Abraham Maslow Tentang Model Motivasi Konsumsi.” *Tesis UIN Sunan Ampel* (2014).

“Deklarasi Djuanda Dan Unclos 1982.” *10 Desember*. Last modified 2018. https://jurnalmaritim.com/bulan-desember-deklarasi-djuanda-dan-unclos-1982/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

“STRATEGI PEMENANGAN POLITIK PASANGAN IDZA-NARJO DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BREBES PERIODE 2012-2017 Surahmadi” 7, no. 2 (2017): 91–111.

BERITA

“Deklarasi Djuanda Dan Unclos 1982.” *10 Desember*. Last modified 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://jurnalmaritim.com/bulan-desember-deklarasi-djuanda-dan-unclos-1982/.

Fathanah, Thea. "Diajak Gabung RI Di Proyek KA Cepat China, Jepang Bingung." *29 Juni*. www.cnbcindonesia.com

Galih, Bayu. "Deklarasi Djuanda: Isi, Tujuan, Dan Dampaknya." *Selasa 18 Februari*. Last modified 2020. /160000969/deklarasi-djuanda-isi-tujuan-dan-dampaknya.

Theodora, Laurensia. "Hubungan Bilateral Yang Terjalin Antara Indonesia Dengan China." www.kumparan.com

Wikepedia, Artikel. "Daftar Kunjungan Kenegaraan Joko Widodo." www.wikepedia.com.

Administrator, "Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara.". https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-rangka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara/

DOKUMEN PENTING

Undang-Undang Tentang Landas Kontinen Indonesia, 1973.

Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia, 1996.

Undang-Undang Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id